

**PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI
FISKAL TERHADAP EFISIENSI PENYEDIAAN
BARANG PUBLIK DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:
Annisa Dewi Setiawati
2012110055**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
BANDUNG
2017**

**THE IMPACT OF FISCAL DECENTRALIZATION
DEGREE ON PUBLIC GOODS PROVISION
EFFICIENCY IN INDONESIA**



UNDERGRADUATE THESIS

**Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Index in Economics**

By

Annisa Dewi Setiawati

2012110055

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS
Accredited by BAN-PT No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/X/2013
BANDUNG
2017**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap
Efisiensi Penyediaan Barang Publik di Indonesia**

Oleh:

Annisa Dewi Setiawati

2012110055

Bandung, Januari 2017

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Dr. Miryam B. L. Wijaya

Pembimbing Skripsi,

Ivantia S. Mokoginta, Ph.D

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Annisa Dewi Setiawati
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 Mei 1994
NPM : 2012110055
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP EFISIENSI PENYEDIAAN BARANG PUBLIK DI INDONESIA

dengan,

Pembimbing : Ivantia S. Mokoginta, Ph.D

SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 17 Januari 2017

Pembuat Pernyataan : Annisa Dewi Setiawati



(Annisa Dewi Setiawati)

ABSTRAK

Hipotesis Tiebout mengatakan bahwa penyediaan barang publik akan lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah lokal. Hal ini terjadi karena pemerintah lokal lebih mengetahui informasi tentang preferensi masyarakatnya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Adanya sistem desentralisasi fiskal memberikan kewenangan bagi pemerintah lokal untuk mengelola aspek keuangannya dan menyalurkannya untuk pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengukur dan menganalisis indeks desentralisasi fiskal 33 provinsi di Indonesia, 2) mengukur dan menganalisis tingkat efisiensi penyediaan barang publik 33 provinsi di Indonesia, 3) melihat bagaimana pengaruh indeks desentralisasi fiskal terhadap tingkat efisiensi penyediaan barang publik di Indonesia. Perhitungan indeks desentralisasi fiskal diukur dengan metode The Enhanced Index of Fiscal Decentralization (EFDI) dengan menggunakan variabel pendapatan asli daerah, total belanja daerah, total pengeluaran agregat pemerintah daerah dan pusat, dan dana perimbangan. Perhitungan efisiensi penyediaan barang publik menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan variabel input berupa jumlah pegawai negeri sipil dan total belanja daerah regional provinsi, sementara variabel outputnya adalah jumlah rumah sakit publik, posyandu, puskesmas, jumlah sekolah negeri, panjang jalan, dan jumlah jembatan. Pengaruh indeks desentralisasi fiskal terhadap penyediaan barang publik dianalisis menggunakan metode Common Effect Model (CEM) dengan variabel dependen efisiensi penyediaan barang publik dan variabel independen yang terdiri dari EFDI dan variabel dummy masing-masing karakteristik 33 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) secara umum nilai indeks desentralisasi fiskal 33 provinsi di Indonesia sangat rendah. 2) Skor efisiensi penyediaan barang publik 33 provinsi di Indonesia sudah cukup tinggi, namun penyediaan barang publik di provinsi DKI Jakarta tidak efisien. Hal ini dikarenakan sebagian besar anggaran provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai biaya operasional bukan untuk belanja barang publik. 3) Indeks desentralisasi fiskal secara statistik signifikan mempengaruhi efisiensi penyediaan barang publik, akan tetapi pengaruhnya negatif. Artinya semakin besar indeks desentralisasi fiskal maka skor efisiensi penyediaan barang publik akan semakin berkurang. Hal tersebut disebabkan karena semakin terdesentralisasi suatu sistem pemerintahan semakin jauh hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya, sehingga pengawasan dari pemerintah pusat akan semakin berkurang dan ini memberikan peluang praktek korupsi yang semakin besar. Temuan ini tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Hipotesis Tiebout.

Kata Kunci: desentralisasi fiskal, efisiensi penyediaan barang publik.

ABSTRACT

Tiebout Hypothesis says that the provision of public goods will be more efficient if provided by the local government. It's because local government know more the information about their society preferences better than central government. Fiscal decentralization authorizes the local government to control its financial aspects and provide public goods according to society preferences. This research aims to 1) measure and analyze the index of fiscal decentralization of 33 provinces in Indonesia, 2) measure and analyze the level of public goods provision efficiency 33 provinces in Indonesia, 3) analyze the impact of fiscal decentralization index on efficiency of public goods provision in Indonesia. The calculation of the index of fiscal decentralization is measured with The Enhanced Index of Fiscal Decentralization (EFDI) method using variables own source revenue local government, expenditure of local government, total national and regional expenditure, and the balance funds. The calculation of public goods provision efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA) method, with input-variable is total civil servants and total local government expenditure. The output variable is total public hospitals, posyandu, puskesmas, public schools, bridge and length of the roads. The influence of fiscal decentralization index on the efficiency of public goods provision is analyzed using Common Effect Model (CEM) with efficient provision of public goods as dependent variable and the independent variables are EFDI and dummy characters of 33 provinces in Indonesia. The study found that 1) The fiscal decentralization index of 33 provinces in Indonesia is low. 2) Efficiency of public goods provision in 33 provinces in Indonesia is High, but DKI Jakarta has the lowest score, which means DKI Jakarta is not efficient to provide public goods. It's because most of the Jakarta provincial budget is used to finance the operating costs not to buy public goods 3) The index of fiscal decentralization is statistically significant affect the efficiency of public goods provision, but it has negative effect. This means the higher fiscal decentralization index will reduce the efficiency of public goods provision. It's because the more decentralized system of government the more distant relationship between central government and local government, so the supervision of the central government will be reduced and this gives an opportunity of corruption increases. These findings do not fit with what is expressed by Tiebout hypothesis.

Keywords: Fiscal decentralization, efficiency of public goods provision.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan, kesehatan, dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Indeks Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Penyediaan Barang Publik di Indonesia. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Selama proses penyusunan dan penulisan skripsi, penulis mendapat bantuan, saran, dukungan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, mama Apit Setiarsih dan papa Koes Purwanto selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dorongan, perhatian, dan pengorbanan yang tulus kepada penulis. Terimakasih juga kepada Ariesa Prahara Setiawan dan Andre Pradipta Setianto selaku kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
2. Ibu Ivantia S. Mokoginta, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang selalu dengan sabar memberikan banyak ilmu, masukan, arahan, waktu, pikiran, tenaga, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Miryam B. L. Wijaya selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan dan dosen bidang kajian EMK yang telah memberikan banyak pengetahuan, motivasi, pengalaman dan pembelajaran yang berharga selama masa perkuliahan
4. Seluruh dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan lainnya yang telah membagikan banyak ilmu kepada penulis. Semoga semua ilmu yang telah penulis peroleh dapat bermanfaat bagi kehidupan penulis di masa yang akan datang.
5. Arif Bintoro yang senantiasa menemani, mencurahkan kasih sayang, memberi semangat dan dukungan yang tak pernah henti, mengingatkan, menghibur, dan mendoakan yang terbaik bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Para sahabat-sahabat penulis: Andhara Jelita Saummantra, Nurul Octaviani Rosadi, Vania Fauziyyah, Febby Nuraini Pakpahan, Agya Fila, Raissa Azaria Arief, Melissa Tiara Putri, Dhila Dahlia Ulfa, Nadia, Salsa,

- Fini, Tika dan Manda yang selalu ada, mendoakan, memberikan semangat, masukan, dan menghibur penulis dengan canda tawa kalian.
7. Keluarga Ekonomi Pembangunan Unpar 2012 yaitu Thesa Angelin, Karin Diandra, Jessica, dan Monica yang selalu memberikan masukan dan semangat selama proses pengerjaan skripsi. Ije yang saling mendukung untuk menyelesaikan skripsi bersama-sama. Gabay, Raka, Gema, Vicky, Rendra, Iyay, Ishal, Rawa, Christoforus, Meddy, Ghassan, Pradana, Ferdi, Bowo, Ivan, Michael, Chris, Darry, Paul, Vhil, Vincent Azis, Karina, Sisca, Swe, dan Widy. Terimakasih banyak atas kebersamaan, persahabatan, canda, tawa, drama, pengalaman, dukungan dan cerita kalian selama ini yang menghiasi hari-hari penulis selama di perkuliahan.
 8. Teman-teman Ekonomi Pembangunan Unpar lainnya: Dania Anisa, Tsana, Rania, Eno, Faza, Icul, Isal, Jo, Marbun, Hanan, Jodi, Aurel, Momo, Getha, Dikcit, Nur, Kaka, Tari, Mariska, Opi, Mimin, Gisel, Henk, Satrio, Andrew, Miun, Radi, Bara, Kemal, Fikran, Rey, Mika, Anas, Rere, Inal, Audi, Mathew, Sisi, Raisa, Dwi, Ajisakti, Rizfa, Lala, Rey, Fikry, Gereon, Jojo, Sandi, Ajeng, Merry, Aya, Fathur, Fatiya, Muti Radit, Toper, Agung, Kenzi, Bagas, Riris, Jasmine, Ucup, Purwadi, Arief, Mia, Kahfi, Adot, Dani, Carlos, Charvin, Artrur, Gege, Pandu, Edwin, Dewo, Andry, Dana, Gerry, Kanisya, Pri, Ona, Keyne, Kevin, Tasya, Pepen, Rika, Tami, Yuni, Windura, Aldo, Lukman, Deba, Maya, Singgih, Rizna, dan Ebet. Terimakasih banyak kepada kakak-kakak dan adik-adik untuk pengalaman, kebersamaan, dukungan dan canda tawanya. Semoga tali silaturahmi kita tak akan pernah terhenti sampai kapan pun.
 9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang ikut memberikan segala bantuan kepada penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada semua yang telah berjasa. Akhir kata, penulis ingin meminta maaf jika ada kekurangan dalam penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandung, 17 Januari 2017

Annisa Dewi Setiawati

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR DIAGRAM.....	xiv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN.....	3
1.3. KERANGKA PEMIKIRAN.....	4
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. DESENTRALISASI FISKAL.....	6
2.1.1. Teori Desentralisasi Fiskal.....	6
2.1.2. Ukuran/Indikator Desentralisasi Fiskal.....	7
2.1.3. Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia.....	9
2.2. BARANG PUBLIK.....	10
2.2.1. Teori Barang Publik.....	10
2.2.2. Penyediaan Barang Publik yang Efisien.....	12
2.3. DESENTRALISASI FISKAL DAN EFISIENSI PENYEDIAAN BARANG PUBLIK.....	14
2.4. PENELITIAN DI INDONESIA.....	16
3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	18
3.1. METODE PENELITIAN.....	18
3.1.1. JENIS DAN SUMBER DATA.....	18
3.1.2. TEKNIK ANALISIS.....	18
3.1.2.1. Pengukuran Desentralisasi Fiskal.....	19
3.1.2.2. <i>Data Envelopment Analysis</i>	21
3.1.2.3. Regresi Data Panel.....	25
3.1.3. MODEL PENELITIAN.....	27
3.2. OBJEK PENELITIAN.....	28
3.2.1. Pendapatan Asli Daerah.....	29
3.2.2. Dana Perimbangan.....	30
3.2.3. Total Belanja Daerah.....	32

3.2.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil.....	33
3.2.5. Sektor Pendidikan.....	34
3.2.6. Sektor Kesehatan.....	35
3.2.7. Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	39
4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. HASIL PENGOLAHAN DATA.....	42
4.1.1. Indeks Desentralisasi Fiskal.....	42
4.1.2. Hasil Analisis DEA.....	47
4.1.3. Hasil Regresi Data Panel.....	50
4.1.3.1. Pemilihan Model.....	50
4.1.3.2. Uji Asumsi Klasik.....	52
4.1.3.3. Hasil dan Estimasi <i>Common Effect Model</i>	55
4.2. PEMBAHASAN.....	58
5. PENUTUP.....	62
5.1. KESIMPULAN.....	62
5.2. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	A-1
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	B-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Skor Efisiensi Penyediaan Barang Publik.....	48
Tabel 2 Uji <i>Redundant Fixed Effect</i>	50
Tabel 3 Data Residual untuk Uji LM	51
Tabel 4 <i>Correlation Matrix</i>	52
Tabel 5 Hasil Uji <i>Park</i>	54
Tabel 6 Hasil Regresi menggunakan CEM.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Kerangka Pemikiran.....	5
Gambar 2 Klasifikasi Barang Publik dan Barang Privat.....	12

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik yang Optimal.....	13
Grafik 2 <i>Fiscal Autonomy</i> Nasional.....	43
Grafik 3 <i>Fiscal Importance</i> Nasional.....	44
Grafik 4 <i>The Enhanced of Fiscal Decentralization</i> Nasional.....	46

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Pendapatan Asli Daerah per Provinsi Indonesia 2012-2014.....	29
Diagram 2 Dana Perimbangan per Provinsi Indonesia 2012-2014.....	31
Diagram 3 Total Belanja Daerah per Provinsi Indonesia 2012-2014.....	32
Diagram 4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil per Provinsi Indonesia 2012-2014.....	33
Diagram 5 Jumlah Sekolah Negeri per Provinsi Indonesia 2012-2014.....	35
Diagram 6 Jumlah Rumah Sakit Publik per Provinsi Indonesia 2012-2014.....	36
Diagram 7 Jumlah Posyandu per Provinsi Indonesia 2012-2014.....	37
Diagram 8 Jumlah Puskesmas per Provinsi Indonesia 2012-2014.....	38
Diagram 9 Panjang Jalan Nasional per Provinsi Indonesia 2012-2014.....	40
Diagram 10 Jumlah Jembatan per Provinsi Indonesia 2012-2014.....	41
Diagram 11 <i>Fiscal Autonomy</i> per Provinsi Indonesia 2012-2014.....	43
Diagram 12 <i>Fiscal Importance</i> per Provinsi Indonesia 2012-2014.....	45
Diagram 13 <i>The Enhanced Index of Fiscal Decentralization</i> per Provinsi Indonesia 2012-2014.....	46

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam dua dekade terakhir ini Indonesia mengalami pergeseran paradigma pembangunan, dari yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada sistem yang sentralisasi, pemusatan wewenang ada pada pemerintah pusat sedangkan peran pemerintah daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sistem tersebut menyebabkan pembangunan yang belum tentu sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga dapat mematikan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya (Syaukani *et al.*, 2002). Sistem pemerintah yang terdesentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus serta mengelola bidang politik dan ekonomi daerahnya secara mandiri. Salah satu lingkup bidang ekonomi tersebut mencakup urusan fiskal daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan seluruh/sebagian tugas dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus serta mengelola seluruh anggarannya baik pemasukan maupun pengeluaran. Manfaat dari pemerintahan yang terdesentralisasi adalah pemerintah daerah menjadi lebih fleksibel dalam mengadaptasi kebutuhan dan preferensi masyarakat dikarenakan posisi pemerintah daerah yang lebih dekat dengan rakyat. Adanya pendelegasian tanggung jawab pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi baik secara teknis dan alokasi. Semakin tinggi kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mengelola wilayahnya, maka akan semakin tinggi pula perkembangan ekonomi wilayahnya. Selain itu kapasitas daerah yang semakin tinggi dalam mengelola wilayahnya sesuai dengan keinginan masyarakat maka akan mendorong terciptanya efisiensi penyediaan pelayanan publik yang semakin efektif dan efisien (Robalino *et al.*, 2001). Dengan kata lain ketika suatu daerah semakin terdesentralisasi maka daerah tersebut akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengelola anggarannya dan hal ini dapat mendorong terciptanya efisiensi penyediaan barang publik.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai asas *money follows function*. *Money follows function* yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, fungsi dari pemerintah pusat hanyalah memberikan masukan serta monitoring pelaksanaan.

Seiring dengan berjalannya waktu berbagai kebijakan terus dijalankan dan dikaji ulang dengan tetap mengutamakan aspek penguatan kapasitas Pemda dalam menjalankan proses desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah melakukan penguatan pembagian kewenangan antara Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari aspek penyempurnaan mekanisme pembiayaan pemerintah memberlakukan mekanisme pengalokasian Dana Desa sebagai pemenuhan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, konsistensi pemerintah untuk menggunakan formula dalam perhitungan DAU serta keberanian menghilangkan aspek *hold harmless* yang akan memberikan jaminan alokasi DAU di suatu daerah dipastikan tidak akan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan RI, 2015).

Penyelenggaraan desentralisasi ini sendiri merupakan suatu bentuk perbaikan penyediaan pelayanan dasar publik yang cenderung menurun jika diselenggarakan secara terpusat (World Bank, 2003). Negara-negara berkembang memberi perhatian kepada pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs), berharap bahwa desentralisasi fiskal dapat memperbaiki akses ke pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial lain. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab atas penyediaan pelayanan publik dan pencapaian *Millenium Development Goals* oleh pemerintah daerah (Kementerian Keuangan, 2012). Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal penyediaan pelayanan publik akan lebih efisien dan efektif.

Dalam kondisi keterbatasan pendapatan daerah saat ini dan adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta tuntutan kebutuhan barang publik yang semakin banyak, maka perlu diupayakan juga penghematan belanja pemerintah melalui rasionalisasi belanja yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran untuk memberikan tingkat pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pada dasarnya kebijakan desentralisasi fiskal diberlakukan agar terciptanya efisiensi sektor publik yang meliputi penyediaan barang publik. Efisiensi penyediaan barang publik yang tercipta akan menghemat belanja pemerintah daerah. Maksud dari efisiensi penyediaan barang publik tersebut menurut Antony *et al.* (2004) dalam Rochana (2009) adalah bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam hal ini adalah keuangan daerah secara akurat dan optimal, untuk kemudian menghasilkan sejumlah output atau layanan publik terbaik kepada masyarakat.

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan menjadikan pemerintah lebih dekat kepada rakyatnya, diharapkan pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan lebih efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat daripada pemerintah pusat, sehingga sangat potensial bagi daerah untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukkan terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat minimal pada pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur seiring berlangsungnya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal melalui pengelolaan anggaran belanja daerah. Dari uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh indeks desentralisasi fiskal terhadap efisiensi penyediaan barang publik di Indonesia ?

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk:

1. Menganalisis dan mengukur besarnya indeks desentralisasi fiskal masing-masing regional 33 Provinsi di Indonesia.

2. Menganalisis dan mengukur efisiensi penyediaan barang publik regional 33 Provinsi di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh indeks desentralisasi fiskal terhadap efisiensi penyediaan barang publik di Indonesia.

Informasi mengenai efisiensi dalam penyediaan barang publik perlu diketahui agar masing-masing daerah dapat mengevaluasi hasil keputusan yang telah ditetapkan guna menghemat pengeluaran belanja daerah mengingat sumberdaya daerah yang ada jumlahnya terbatas namun kebutuhan akan penyediaan barang publik tidak terbatas.

1.3. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut perspektif kepentingan ekonomi, salah satu alasan diterapkannya desentralisasi fiskal adalah sebagai upaya menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik. Rochana (2009) menyatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, dengan alasan:

- Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya.
- Pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.
- Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk melakukan inovasi.

Tiebout mengemukakan bahwa ada faktor yang terlupakan dalam penyediaan barang dan jasa publik, yaitu pendanaan dan kompetensi. Pada pasar barang privat, pendanaan merupakan pemicu yang paling mendasar mengenai efisiensi pasar barang privat. Sedangkan kompetensi mendorong produsen-produsen untuk memproduksi barang swasta seefisien mungkin sehingga mereka dapat berkompetisi di pasar. Jika penyediaan barang dan jasa publik diselenggarakan secara sentralisasi, akibatnya adalah ketiadaan/rendahnya kompetisi nyata yang dihadapi oleh pemerintah pusat pada saat pembuatan keputusan berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik. Keputusan yang dihasilkan dapat tidak efisien sama sekali.

Oleh karena itu, Tiebout menyarankan agar penyediaan barang dan jasa publik sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah daerah (*local government*).

Tiebout berpendapat bahwa pada saat barang dan jasa publik disediakan di tingkat lokal, kompetisi antar pemerintah daerah secara natural akan meningkat karena individu yang menjadi penduduk suatu daerah dapat memilih dan menilai sendiri kualitas dari penyediaan barang dan jasa publik oleh suatu pemerintah daerah dibandingkan dengan kontribusi yang telah dibayarkannya dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Tiebout menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang dan jasa publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi, masyarakat lokal, dan pemerintah daerahnya. Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara pelayanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat.

Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka hanya ada dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut atau tetap tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah lokal melalui legislatifnya. Hipotesis tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat potensi untuk mencapai efisiensi ekonomi (maximizing social welfare) dalam penyediaan barang publik pada tingkat lokal. Gambar 1 mencoba menjelaskan secara ringkas alur kerangka penelitian yang telah dipaparkan.

Gambar 1 – Alur Kerangka Pemikiran



Penelitian ini akan mengukur seberapa besar indeks desentralisasi fiskal dan menghitung tingkat efisiensi penyediaan barang publik masing-masing 33 provinsi di Indonesia. Setelah perhitungan indeks desentralisasi fiskal dan tingkat efisiensi penyediaan barang publik didapatkan, perhitungan tersebut akan diolah kembali untuk mengetahui bagaimana pengaruh indeks desentralisasi fiskal terhadap efisiensi penyediaan barang publik di Indonesia